

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi antara Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin dengan baik dari 1973. Kedua pihak ini resmi melakukan hubungan diplomatik dan terus berlangsung hingga saat ini. Meskipun telah berlangsung lama, hubungan konsulat Indonesia dan Korea Selatan pada 1996 hingga 2000 dapat dikatakan tidak terlalu dekat. Hal ini disebabkan karena situasi Perang Dingin yang masih sangat terasa. Korea Selatan lebih cenderung memihak Blok Barat dan menjadi bagian dari aliansi Amerika Serikat sedangkan Indonesia memutuskan untuk tidak condong kepada blok manapun dan mendirikan Gerakan Non-Blok (Muchsya, 2020).

Sejak tahun 1980-1990 hubungan kedua negara mengalami peningkatan di beberapa bidang seperti bidang politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Di antara berbagai sektor kerja sama, penguatan di bidang ekonomi adalah satu dari sekian banyak aspek utama yang terus dilakukan pihak Indonesia terhadap Korea Selatan. Pada periode ini, Indonesia menjadikan Korea Selatan sebagai satu dari sekian banyak mitra utama dengan tujuan untuk meningkatkan ekonominya. Korea Selatan secara aktif melakukan investasi pada bidang industri pertambangan, pertanian, dan perikanan di Indonesia (Jeong, 2003). Kepemilikan sumber daya alam Indonesia memang cukup melimpah, namun Indonesia mempunyai potensi lebih untuk memberi keuntungan bagi investasi asing sehingga Korea Selatan cenderung memfokuskan kerjasamanya internasionalnya terhadap Indonesia.

Kemudian pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 4 Desember, kesepakatan berupa *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun demi memperkuat hubungan strategis antara kedua negara (Afriantari & Putri, 2017). Salah satu bidang yang mendapatkan perhatian lebih oleh kedua negara adalah bidang ekonomi. Dalam pertemuan Joint Declaration tersebut di bentuk *Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC)* yang fokus membahas tentang berbagai proyek kerjasama ekonomi (Rompas, 2019).

Selama kuartal terakhir tahun 2008, Indonesia mengalami kemajuan penting dalam perdagangan bilateral secara keseluruhan. Terlepas dari krisis global yang berlangsung dan

mempengaruhi beberapa negara termasuk Indonesia dan Korea Selatan, upaya kedua negara untuk terus melakukan kegiatan ekonomi menunjukkan peningkatan yang konsisten. Total nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan mengalami peningkatan yang signifikan, yakni mencapai 19,25 miliar USD. Angka tersebut memperlihatkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 29,36 persen. Ekspor Korea Selatan ke Indonesia senilai 7,93 miliar USD dan impor Korea dari Indonesia senilai 11,32 miliar USD. Hubungan kerja sama kedua negara dua pihak menyentuh titik puncaknya di tahun 2011. Keseluruhan transaksi tercatat hingga 12,31 miliar USD ini bertambah berkisar 32,26 persen jika dilihat dari tahun 2010, yang mana keseluruhan dagangnya menyentuh nilai sebesar 9,31 miliar USD. Dilain sisi, dari rentang waktu 2008 sampai 2012, terdapat kenaikan pada volume perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 20,5 persen. Di Indonesia, telah berdiri 2.500 perusahaan yang dihadirkan oleh pihak swasta Korea Selatan dan di saat yang bersamaan jumlah penduduk Korea Selatan di Indonesia melebihi 30.000 individu. Korea Selatan telah mencapai posisi ketujuh pada sisi investor luar negeri paling besar di Indonesia. Mayoritas investasi tersebut difokuskan pada sektor manufaktur, yakni di bidang tekstil, mainan anak, alas kaki, dan plastik.

Kerjasama kedua negara antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya pada bidang perekonomian terus berkembang. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya perjanjian-perjanjian lain. Salah satunya adalah kesepakatan kerjasama ekonomi yang dilakukan secara komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan atau yang lebih dikenal dengan IK-CEPA dilakukan tahun 2012. Kemitraan ini mencakup beberapa aspek seperti perdagangan, jasa, investasi, aturan asal, dan kerjasama ekonomi. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah guna memaksimalkan pertumbuhan relasi dagang dan perekonomian melalui tiga pilar fundamental: akses pasar untuk pertukaran produk dan jasa, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan kolaborasi dalam pengembangan kapasitas (Pujayanti, 2019). Namun demikian, pembahasan antara IK-CEPA menemui jalan buntu selama putaran ketujuh tahun 2014 karena adanya beberapa topik perdebatan yang menjadi tantangan dalam mencapai konsensus. Pada September 2018, kunjungan resmi Presiden Jokowi ke Korea Selatan menjadi saksi penegasan kembali dedikasi kedua negara terhadap pembahasan yang sedang berlangsung terkait IK-CEPA. Dengan perjanjian tersebut, Indonesia memperoleh kewenangan pasar pada produk industri, seperti perikanan dan hortikultura di Korea Selatan. Sebaliknya, Indonesia juga akan memberikan kewenangan pasar bahan baku industri serta menyediakan bermacam fasilitas investasi Korea Selatan di Indonesia (Ananda, 2019).

Selain itu, Indonesia-Korea Selatan juga membangun kerjasama di sektor ekonomi kreatif dengan mengembangkan Kerjasama bidang kreatif melewati berbagai instansi pemerintah di Indonesia yaitu BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) dan Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) atau Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan (Afriantari & Putri, 2017). Beberapa kerjasama di subsektor seperti film, fashion, animasi, kuliner, konten TV, komik, teknologi informasi dan seni pertunjukan telah berjalan selama beberapa tahun ini. Aktor-aktor seperti pemerintah, pengusaha, kelompok organisasi atau *people to people* menjadi salah satu mekanisme dari kerjasama di sektor industri kreatif ini. Dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan benar-benar fokus menjalin kerjasama ekonomi dan berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada keduanya.

Memasuki tahun 2020, sistem perekonomian dunia mengalami guncangan yang cukup hebat diakibatkan timbulnya virus covid-19. Penyebaran virus yang masif ke seluruh dunia mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia hampir di segala aspek. Keterbatasan mobilitas masyarakat global pada akhirnya berimbas pada arus perekonomian global yang menjadi terhambat. Menurut Pambudi, dampak pandemi Covid-19 terhadap neraca perdagangan Indonesia mengakibatkan defisit sebesar 344,7 juta USD per April 2020. Pengaruh lain yang juga dialami adalah dari sektor industri yaitu industri pengolahan. Sejauh ini, sektor manufaktur telah berkontribusi dalam mempertahankan perekonomian, dengan barang-barang dari industri pengolahan berkisar 70 persen dari keseluruhan ekspor negara. Kinerja sektor manufaktur di Indonesia mengalami perlambatan seiring dengan bertambahnya fenomena COVID-19 di Nusantara (Nabilla, 2021). Lebih spesifik, perdagangan Indonesia terhadap Korea Selatan mengalami penurunan menjadi 13,36 miliar USD pada 2020. Data ini merupakan nilai terendah yang didapat dalam sepuluh tahun terakhir, seiring dengan kemunculan pandemi Covid-19. Kemudian pada 2021 neraca perdagangan Indonesia pun belum menunjukkan angka yang terlalu baik, di mana Indonesia masih mengalami defisit sebesar 446,72 juta USD (Kusnandar, 2022).

Kondisi ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan yang mengalami penurunan di beberapa sektor melatar belakangi keputusan pembuatan strategi yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki perekonomian negara. Berbagai kerjasama yang dilakukan kedua negara selama ini dan telah menunjukkan hasil yang positif juga menjadi alasan Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra untuk menangani masalah ekonomi akibat pandemi covid-19.

Pada penerapannya, Korea Selatan dan Indonesia telah berupaya memulihkan kondisi ekonomi di era awal pandemi. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan adalah pengamanan terhadap keuangan global melalui skema pertukaran mata uang (*currency swap*). Menko Perekonomian Indonesia dan Menteri Perdagangan Korea Selatan mengesahkan penandatanganan *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)* antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada 5 Maret 2020. Plafonnya senilai KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun, yang berlaku efektif mulai 6 Maret 2020 sampai 5 Maret 2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Selain itu, Indonesia juga mendorong skema keuangan lain yakni *Local Currency Settlement with Appointed Cross Currency Dealer (LCS ACCD)*. Hal ini merupakan penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang dan yurisdiksi wilayah masing-masing. LCS ACCD dilakukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas dalam penyelesaian perdagangan, sehingga mengurangi tekanan dollar Amerika Serikat terhadap mata uang lokal (Setyowati, 2020).

Bentuk strategi lainnya adalah melalui IK-CEPA yang ditandatangani di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 18 Desember. Di bawah kerangka Perjanjian ini, Korea berhasil menghapuskan total 11.686 preferensi tarif (PT), mewakili 95,54 persen dari keseluruhan PT. Demikian pula, Indonesia mencapai pengurangan yang signifikan dengan menghilangkan 9.954 PT, yang merupakan 92,06 persen dari seluruh PT. Indonesia telah menerapkan tarif yang menguntungkan untuk memfasilitasi investasi Korea di negara tersebut, yaitu untuk 104 perusahaan terbatas (PT), yang jumlahnya sekitar 0,96 persen dari total jumlah PT. Pada gilirannya, IK-CEPA juga dapat menjadi daya tarik bagi investor Korea Selatan untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk menanamkan modal. Meskipun telah dilakukan sejumlah pertemuan di era awal pandemi, upaya-upaya lain tentu perlu dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan demi menguatkan dan menstabilkan ekonomi negara di masa mendatang, mengingat perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan pulih sepenuhnya. Oleh sebab itu, kajian ini akan membahas terkait strategi diplomasi ekonomi terhadap Korea Selatan di era pandemi tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu:
Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan di era pandemi tahun 2022?

C. Kerangka Berpikir

Dalam menganalisis rumusan masalah, penulis menggunakan konsep diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi mengacu pada upaya kolaboratif antara dua negara yang bertujuan untuk mencapai hasil ekonomi yang saling menguntungkan. Diplomasi ekonomi merupakan hal yang penting guna memelihara relasi perekonomian oleh kedua pihak negara yang diharapkan dapat diterapkan secara tepat, mengingat perekonomian masing-masing negara dapat mempunyai kesensitifan dalam satu atau berbagai hal (H & Kartasasmita, 2015). Suatu negara menggunakan alat perekonomian guna mengejar kebutuhan ekonominya melewati pengaruh pada keadaan dan ketetapan ekonomi organisasi internasional dan di negara asing, oleh karena itu membuat dan menerapkan pilihan. Diplomasi ekonomi ditandai dengan pengutamaan kepentingan ekonomi suatu negara dalam keterlibatannya dengan aktor internasional tertentu.

Pada penerapan diplomasi ekonomi, terdapat 4 pilar kegiatan ekonomi (Djelantik, 2008):

1. Promosi perdagangan. Tujuan utama dari promosi perdagangan adalah untuk memfasilitasi tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan volume ekspor, namun tidak terbatas pada aspek ini saja.
2. Promosi peluang investasi. Penekanannya adalah pada promosi prospek investasi, dengan fokus khusus pada investasi dalam negeri daripada hanya menargetkan investasi asing.
3. Menarik masuk teknologi yang memadai. Pilar ini menekankan pada penggabungan sumber daya teknologi yang memadai, seperti teknologi pemanenan yang maju, termasuk teknologi pemanenan mutakhir.
4. Pengelolaan bantuan ekonomi. Aspek ini cukup krusial baik bagi negara berkembang yang sering menerima bantuan maupun negara maju yang sering bertindak sebagai donor.

Tujuan menyeluruh dari perdagangan adalah untuk memajukan kepentingan negara, sehingga memfasilitasi kegiatan tersebut di atas. Kampanye promosi ini selaras dengan tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan citra nasional negara tersebut, seperti yang sering terlihat dalam inisiatif terkait pemasaran wisata. Meningkatkan reputasi negara asal merupakan tanggung jawab penting dan mendasar dari upaya diplomatik yang bersangkutan, yang memerlukan integrasi dengan beragam usaha asing. Praktik diplomasi ekonomi berpotensi untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik bagi negara yang terlibat di

dalamnya maupun negara penerima. Pembentukan perjanjian perdagangan berpotensi mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan bagi entitas yang berpartisipasi. Mengenali kekurangan yang ada dalam ekonomi dan membangun aliansi kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkait merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan operasi departemen luar negeri dan perdagangan di dalam negara. Dalam masyarakat kontemporer, konsep pembangunan dan keterkaitan saling terkait erat, hingga dianggap tidak dapat dipisahkan. Selain itu, bentuk-bentuk diplomasi perekonomian dapat dimaksimalkan oleh tiap-tiap negara dan diselaraskan dengan keunikan negara terkait, serta diselaraskan dengan keperluan khusus saat situasi tertentu (Djelantik, 2008).

Dalam konteks penelitian ini, diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan di tahun 2022 merupakan upaya lanjutan dalam pemulihan ekonomi negara yang terdampak oleh pandemi. Keputusan untuk melakukan diplomasi ekonomi terhadap Korea Selatan sebagai negara yang telah menjalin hubungan baik sejak lama nampak lebih strategis dan efektif dalam mewujudkan kepentingan Indonesia. Pada awal tahun 2022, Indonesia menguatkan diplomasi ekonomi terhadap Korea Selatan di era pandemi yang ditandai dengan dilakukannya pertemuan antara pihak Indonesia dan Korea Selatan pada *Joint Committee Meeting on Economic Cooperation* (JCEC). Forum tersebut mencapai konsensus untuk mendorong kolaborasi di beberapa bagian, termasuk komersial dan investasi, sumber daya mineral dan sumber energi, industri, serta perdagangan digital. Menurut Press (2022), hasil dari JCEC mencakup beberapa pencapaian yang signifikan. Antara lain pendirian Pusat Kerjasama Bisnis Indonesia, upaya kolaboratif dalam memaksimalkan fasilitas pengisian transportasi listrik, investasi bio-nano, serentak memaksimalkan industri pekapalan dengan kompleksitas tinggi seperti kapal tanker dan derek, serta pembentukan pusat alih teknologi yang dikenal dengan Machine Tools Technical Center di ITB Bandung. Bersamaan dengan konferensi JCEC pertemuan bisnis berlangsung di Indonesia-Korea Business Forum. Forum ini merupakan upaya kerjasama KADIN Indonesia dan Korcham yang bertujuan untuk mempertemukan pelaku bisnis dari Indonesia dan Korea Selatan. Pertemuan kali ini berfungsi sebagai realisasi dari hasil yang diperoleh dari upaya kolaboratif yang dibangun di dalam forum JCEC.

D. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis membuat jawaban sementara terkait rumusan masalah mengenai bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan di

era pandemi tahun 2022 yaitu Indonesia melakukan model diplomasi yang telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi melalui Joint Committee Meeting on Economic Cooperation dengan menerapkan dua pilar diplomasi ekonomi yang menjadi landasan penerapan diplomasi ekonomi, yaitu promosi perdagangan dan promosi peluang investasi.

E. Tujuan Penelitian

1. Guna melihat pengaruh pandemi covid-19 pada kondisi ekonomi Indonesia.
2. Guna menjelaskan bentuk diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan di era pandemi tahun 2022.

F. Metodologi Penelitian

Kajian ini memakai metode deskriptif sebagai metodologinya. Pendekatan ini memiliki tujuan guna menjabarkan suatu fenomena dan situasi secara sistematis berdasarkan fakta secara apa adanya (Sudaryono, 2017). Pada konteks penelitian ini, di mana metode deskriptif menjadi instrumen untuk menjelaskan strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan di era pandemi sesuai fakta yang terjadi menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Data yang termasuk pada analisis kajian ini bersumber dari data sekunder. Pengumpulan data sekunder untuk penelitian ini mencakup berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, publikasi web, pernyataan berita resmi kementerian, dan penelitian sebelumnya. Langkah pertama dalam melakukan studi literatur untuk penelitian memerlukan penggunaan pendekatan analisis deskriptif, di mana proses sistematis digunakan untuk mengoleksi dan merancang semua data terkait yang berasal dari banyak sumber.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada diplomasi di bidang ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Konsep diplomasi ekonomi yang dipakai pada kajian ini ditekankan pada strategi yang diterapkan Indonesia terhadap Korea Selatan di tengah situasi pandemi tahun 2020-2022.

H. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari bagian pendahuluan yang akan diawali dengan latar belakang masalah. Pada bagian tersebut dijelaskan secara umum tentang hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan, khususnya di bidang ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan

terkait kemunculan pandemi covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, muncul rumusan masalah tentang bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan di era pandemi tahun 2022. Penulis kemudian membuat hipotesis terkait rumusan masalah menggunakan konsep diplomasi ekonomi. Selain itu, penulis juga menjelaskan tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah pemaparan terkait dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan sejak awal hingga saat ini di bidang ekonomi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengaruh pandemi covid-19 terhadap menurunnya kondisi perekonomian Indonesia, di mana covid-19 telah berdampak pada industri komersil yang mengalami defisit. Sektor manufaktur seperti industri pengolahan juga melambat seiring meningkatnya penyebaran virus covid-19. Selain itu, meredupnya sektor pariwisata, PHK masal, penurunan impor, dan inflasi adalah hal lain yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang dihadapi Indonesia.

BAB III merupakan bagian yang menjelaskan strategi yang di lakukan Indonesia terhadap Korea Selatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia melalui diplomasi ekonomi. Penerapan strategi yang di lakukan Indonesia terhadap Korea Selatan melalui *Joint Committee Meeting on Economic Cooperation* berkaitan dengan penerapan pilar-pilar yang menjadi landasan penerapan diplomasi ekonomi, yakni promosi peluang perdagangan dan promosi peluang investasi.

BAB IV adalah bagian akhir meliputi kesimpulan atas hasil penelitian.